URGENSI PENDIDIKAN NILAI UNTUK ACEH DAMAI BERKELANJUTAN

M. Jamil Yusuf
Dosen Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Abstrak

Sustainable peace in Aceh should be started from the critical value of education and education based values are integrated in all subjects and can be taught at each level of development. The assumption is that the value of education is needed at each level of development and need to be implemented on all aspects of life. The Education curriculum should reflect the religious values, independence and entrepreneurship as cores value of education, as well as the values of excellence (excellence) that should be achieved by everyone at all levels and types of education in its path. Both of these values must be built through the education system that is able to develop a good understanding, the courage to think, to act and be able to build the establishment of persistence.

Educational value may be applied only in a democratic educational system, in which the learner to express his opinions in an atmosphere of mutual understanding. Learners need to be portrayed as subjects with individual excellence, which is reflected in the ability to build friendship, cooperation within the group, achieve higher performance, empathize with others, able to solve problems, resolve conflicts, have a sense of humor, self-motivated when faced with periods of tough and able to face tough times with confidence. With this advantage, they feel proud of their education and meaningful to the advancement of his career. As such, they have a place in the field of work and the opportunity of participation in any development process and not feel marginalized.

Kata kunci: *Urgensi, pendidikan nilai, Aceh damai*

A. Pendahuluan

Di Eropa, gerakan pemikiran mengenai urgensi pendidikan nilai telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia I ketika mereka menyaksikan berbagai kehancuran yang ditimbulkan oleh perang tersebut. Dalam Perang Dunia I jutaan manusia mati sia-sia. Lalu orang-orang ketika itu saling menyapa "apa yang terjadi di antara kita?" Dalam berbagai kesempatan, mereka memperbincangkan tentang sesuatu yang lebih bernilai dari sekedar kelimpahan materi, kehebatan sains dan teknologi, kemampuan militer dan kekuatan ekonomi. Namun demikian, sebagai bagian dari tabiat manusia bahwa ia mudah lupa terhadap sesuatu. Penyesalan orang Eropa pada akhir Perang Dunia I (1914-1918) itu dalam waktu kurang dari seperempat abad lenyap ditelan masa dengan terjadinya Perang Dunia II (1941-1945) yang jauh lebih dahsyat daripada perang-perang sebelumnya.

Begitu selesai Perang Dunia II, terus terjadi Perang Dingin (1945-1989) yang hampir saja membawa manusia pada konflik nuklir yang diprediksikan bisa membuat permukaan bumi ini menjadi rawa-rawa. Selama Perang Dingin, isu-isu tentang nilai, moral, etika kehidupan, termasuk kelestarian lingkungan hangat diperbincangkan. Di samping itu, studi polemologi yang mengkhususkan diri pada asal usul, hakikat dan dimensi-dimensi perdamaian serta cara menciptakannya menjadi isu yang sangat populer. Masyarakat pun menjadi sangat sensitif terhadap isu-isu apa pun yang bermuatan nilai. Begitu juga halnya ketika umat manusia menyambut datangnya abad 21, di mana majalah *Newsweek* pernah menurunkan laporan utama yang mengevaluasi perjalanan manusia selama abad 20. Dalam laporan tersebut disimpulkan bahwa selama abad ke-20 manusia lebih banyak menggunakan waktunya untuk saling berperang daripada untuk saling mewujudkan perdamaian.[1] Di samping itu, isu pendidikan nilai ini juga ada kaitannya dengan isu perbincangan masalah kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence/Quotient*, *SI/EQ*). Masalah SI/EQ ini telah mengambil alih popularitas perbincangan mengenai intelegensi intelektual (*Intellegence Quotient, IQ*) yang telah begitu

[1] Rohmat Mulyana, *Mengaktualisasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeda, 2004), ii-iii.

lama mendominasi arena psikologi sejak dasawarsa kedua abad ke-20.[2]

Di Indonesia, masalah pendidikan nilai juga lama menjadi tema sentral untuk diperbincangkan, tetapi pada implementasinya belum digarap secara serius dalam setiap gerak langkah pendidikan. Begitu juga halnya, dalam gerak langkah pendidikan di Aceh dapat dikatakan belum ada gerakan yang sistematis untuk penerapan pendidikan nilai. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang ada arus pemikiran dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk memberikan perhatian yang proporsional terhadap dimensi-dimensi nilai dari tujuan pendidikan, bersama-sama dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Sejak akhir dasawarsa 1970-an, para ahli mulai secara sungguh mengembangkan teori pendidikan yang menekankan pada aspek nilai dan sikap. Sedangkan dalam referensi Barat, gerakan ini ditandai dengan munculnya teori *confluence education, affective education* atau *values education*.

Di lihat dari sudut pandang kehidupan masyarakat Aceh, urgensi pendidikan nilai terletak pada upaya mengokohkan keyakinan peserta didik supaya mereka berbuat kebenaran, kebaikan dan keindahan, yang keberhasilannya diukur pada tema-tema nilai yang universal. Idealnya, akibat dari proses pendidikan dan pengajaran yang dilaluinya, dengan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasara pendidikan terutama pasca konflik dan tsunami misalnya, mereka mampu berpikir logis dan menggunakan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan kecerdasan, kemudahan teknologi dan kecukupan sarana pendidikan, seyogianya mereka nantinya lebih bijak dan arif dalam menempuh kehidupan ini. Dalam kenyataan sekarang ini, ada sebagian lulusan yang kualitas kemanusiaannya lebih rendah dibandingkan dengan kemajuan berpikir dan teknologi yang dicapainya. Seharusnya dengan keadaan hidup yang telah dibangun kembali (rehab rekons) itu dapat mewujudkan suatu kehidupan yang aman dan damai serta lebih arif dan bijak dalam mempersiapkan diri untuk membangun masa depan.

---

[2] J.P. Chapplin, *Kamus Lengkap Psikologi,* Alih bahasa: Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 253.

Begitu pentingnya pendidikan nilai seperti digambarkan di atas, maka masalah ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan terintegrasi. Dengan demikian, pandangan monolistik dengan melimpahkan tanggung jawab pendidikan nilai kepada guru bidang studi Pendidikan Agama saja, tentunya sudah tidak relevan lagi. Dalam kajian ini ditekankan pada upaya menemukan pandangan komplementer (tanggung jawab bersama) untuk penerapan pendidikan nilai. Dengan demikian, diharapkan kualitas kepribadian, moral, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik dapat menjadi salah satu pilar terwujudnya Aceh damai berkelanjutan.

B. Pembahasan

a. Urgensi Pendidikan Nilai

Pertimbangan nilai merupakan peristiwa yang selalu dialami dalam kehidupan seseorang. Pertimbangan nilai dapat terjadi pada setiap persoalan kehidupan, mulai dari persoalan yang sederhana sampai pada persoalan yang amat kompleks. Bayi yang menangis untuk mendapat perhatian, pembeli yang memilih barang di pasar atau politisi yang berdebat mengenai persoalan bangsa, itu semua melibatkan persoalan nilai. Beberepa pertimbangan nilai dapat terjadi pada persoalan-persoalan kecil, seperti apakah seseorang memilih minum kopi, teh dingin, teh panas atau teh tawar ketika ia hendak memesan minumannya. Bisa jadi dalam beberapa pertimbangan itu terdapat nilai ekonomi, kesehatan atau nilai pergaulan/persahabatan. Begitu pula halnya pertimbangan nilai mengambil peranan penting ketika seseorang menentukan pilihan-pilihan strategis dan memiliki dampak besar bagi kehidupan secara keseluruhan, baik individu, masyarakat dan bangsa. Individu memiliki pertimbangan nilai tersendiri ketika ia hendak menjalani hidup sebagai ilmuwan, pengusaha, memasuki dunia politik, dunia seni, dunia olahraga professional atau ketika seseorang memilih berbeda pendapat dan pandangan, bahkan peperangan.

Pada prinsipnya, kehidupan selalu menuntut untuk menentukan pilihan atas dasar acuan nilai baik-buruk, benar-salah dan sebagainya. Sejak zaman Yunani Kuno, persoalan nilai telah diangkat dalam kerangka teoritik. Sekurang-kurangnya sejak zaman Plato, ide ”baik”

ditempatkan paling atas dalam hirarki ide-ide. Karena itu, kajian tentang nilai merupakan kajian yang sudah sangat tua usianya. Namun pada akhir abad ke-19, kajian tentang nilai semakin mendapat perhatian dikalangan filosof secara akademis, sehingga melahirkan cabang filsafat baru yang disebut *aksiologi* atau teori nilai.[3] Teori nilai yang meliputi keaslian, hakikat, pengelompokan, dan tempat kemudian mendapat perhatian yang cukup besar dalam kajian para sarjana, yang akhirnya menjadi kajian yang amat menarik dewasa ini. Masalah etika sebagai kajian nilai dalam tindakan manusia, dan estetika sebagai kajian nilai dalam seni merupakan dua masalah penting dalam kajian pendidikan nilai ini.

Dalam masyarakat yang statis, nilai diletakkan dalam kebiasaan dan tradisi. Dalam masyarakat seperti itu, mereka menerima dan mengikuti nilai-nilai yang dirujuk dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Berbeda dengan masyarakat modern yang kehidupannya cepat berubah, nilai sering muncul sebagai topik kontroversial dan menyebabkan konflik. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, seperti konflik di Poso, Maluku, Aceh dan pro kontra masalah ”pornoaksi” dan ”pornografi” di DPR RI beberapa waktu yang lalu merupakan fenomena yang amat nyata tentang pertentangan nilai. Pertentangan itu muncul disebabkan oleh perbedaan pertimbangan nilai, perbedaan rujukan nilai dan perbedaan kepentingan. Di samping itu, masalah standar nilai benar salah, baik buruk, indah tidaknya suatu tindakan ditempatkan pada kategori interpretasi yang subyektif. Nilai itu sebenarnya merupakan makna yang terkandung di balik fenomena kehidupan seseorang. Dengan kata lain, nilai adalah makna yang mendahului fenomena kehidupan itu. Pada waktu nilai itu berubah, fenomena kehidupan pun mengikuti perubahan nilai tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika fenomena kehidupan itu berubah, maka nilai cenderung mengikutinya.

Oleh karena itu, salah satu cara mengamati nilai dapat dilakukan dengan memperhatikan fenomena yang lahir dalam kehidupan individu dan masyarakatnya. Dalam konteks ini, ada beberapa hal penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh akhir-akhir

[3] Bertens, *Etika*, Seri Filsafat Atma Jaya 15 (Jakarta: Gramedia, 1999), 20.

ini dan menjadikan kehidupan masyarakat Aceh sudah jauh berubah dari sebelumnya.

Pertama, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa masyarakat Aceh pada umumnya ke dalam kancah kehidupan modern. Kehidupan modern yang ditandai oleh kemajuan iptek yang demikian cepat, sering kali membuat sebagian anggota masyarakat mendadak kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Mengapa demikian, dapat disimak dari pendapat Rohmat Mulyana yang menyatakan bahwa jumlah penemuan di akhir abad ke-20 sama banyaknya dengan jumlah penemuan sepanjang sejarah umat manusia. Di samping itu, diperkirakan bahwa 90% dari ilmuwan yang pernah dilahirkan di dunia ini, sekarang mereka itu masih hidup dan sedang produktif bekerja untuk berbagai penemuan ilmiah berikutnya.[4] Dengan kemajuan iptek benar-benar telah mengubah tatanan kehidupan menjadi serba mudah dan instant. Namun di balik perubahan tatanan kehidupan yang bersifat material ini sering menimbulkan konflik nilai yang amat rumit dipecahkan.

Kedua, dengan perkembangan globalisasi di mana masyarakat Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan daripadanya, maka persoalan pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang perlu ditumbuh kembangkan. Secara filosofis Socrates menegaskan bahwa pendidikan itu merupakan proses pengembangan manusia ke arah kearifan (*wisdom*), pengetahuan (*knowledge*) dan etika (*conduct*). Oleh karena itu, membangun aspek kognisi, afeksi dan psikomotor secara seimbang dan berkesinambungan adalah nilai pendidikan yang paling tinggi. Zaim Elmubarok menyebut ketika Uni Sovyet meluncurkan pesawat luar angkasanya yang pertama Spotnic tanggal 4 Oktober 1957, lalu dengan segera Amerika Serikat menghadang, karena Amerika Serikat sebagai negara dengan kemampuan teknologi tinggi— merasa dipecundangi oleh Uni Sovyet.[5]

Presiden Amerika Serikat ketika itu langsung membentuk tim khusus (*special unit*) guna merespon perkembangan yang terjadi di Uni

---

[4] Rohmat Mulyana, ..., 99-100.

[5] Zaim Elmubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai*: *Mengumpul yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan Menyatu yang Tercerai* (Bandung: Alfabeta, 2008), 4.

Sovyet. Tim ini tidak dimaksudkan untuk menandingi kecanggihan teknologi Uni Sovyet, tetapi secara khusus dibentuk untuk meninjau kembali kurikulum pendidikan di AS mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Dalam waktu yang singkat tim ini membuat sebuah statemen yang amat mengejutkan, yakni kurikulum pendidikan Amerika sudah tidak layak pakai dan segera harus direvisi. Amerika pun melakukan pembaharuan di bidang pendidikan mulai dari kurikulum, mata pelajaran, tenaga pengajar, sarana pendidikan sampai kepada sistem evaluasi. Usaha yang amat berani ini segera membuahkan hasil yang luar biasa. Salah satu indikatornya, tanggal 14 Juli 1969 Amerika berhasil menempatkan manusia pertama di permukaan bulan. Dengan indikator ini sekaligus menempatkan Amerika Serikat berhasil mengungguli teknologi Uni Sovyet dalam masa 12 tahun.

Pada kejadian yang hampir serupa juga pernah terjadi di Jepang seusai kekalahan mereka dalam Perang Dunia II dengan dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Keadaan Jepang ketika itu praktis lumpuh dalam segala segi kehidupan. Bahkan Kaisar Jepang kala itu menyatakan bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali tanah dan air. Dalam suasana duka yang mendalam itu, Kaisar memanggil para pejabat yang ada dan bertanya: "*berapa orang guru yang masih hidup?*" Ini merupakan pertanyaan yang amat sederhana ketika itu, tetapi mengandung makna yang amat mendalam dalam bidang pendidikan dan memberikan kontribusi yang amat signifikan bagi kemajuan teknologi Jepang di masa sekarang. Jepang secara amat terprogram dan sistematis membenahi sistem pendidikannya pada semua jenjang pendidikan. Dengan pembenahan awal yang dimulai pada bidang pendidikan, Jepang berhasil bangkit dari keterpurukan menjadi negara yang kuat dalam bidang teknologi, ekonomi, komunikasi dan kemajuan bidang pendidikan itu sendiri, bahkan menjadi pesaing utama bagi Amerika Serikat.

Ketiga, jika Jepang di bom tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dibandingkan dengan Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, maka kedua negara ini dapat digolongkan sama-sama memulai pembenahan diri dari keterpurukan pada waktu yang bersamaan.

Pada tahun 2011 ini (dalam masa 66 tahun) kedua profil negara ini memperlihatkan dua kondisi yang saling bertolak belakang. Jepang kini tampil sebagai negara maju, kuat dan rakyatnya sejahtera, sementara Indonesia masih menamakan diri sebagai negara berkembang, dililit oleh utang, upah buruh yang rendah, mayoritas rakyatnya miskin harus diberi bantuan langsung tunai, para birokrat masih miskin apresiasi dan bergelimang dengan korupsi serta haus kekuasaan.

Salah satu contoh kemajuan pendidikan di Jepang adalah berubahnya pengertian ”buta huruf” dari ”tidak bisa tulis baca dan berhitung” menjadi ”tidak bisa menggunakan komputer untuk berbagai kepentingan kehidupan”. Sedangkan di Indonesia pengertian ”buta huruf” masih abadi seperti pengertian semula ketika Indonesia baru merdeka tahun 1945, yakni *”tidak bisa membaca, menulis dan berhitung”*. Bahkan pada tingkat regional di Aceh baru-Baru ini, hasil survey Yayasan Anak Bangsa (YAB) pada empat SD di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ditemukan 112 murid kelas IV s/d VI yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.[6] Oleh karenanya, program pemberantasan buta aksara (Program Paket A) masih merupakan program prioritas untuk pendidikan luar sekolah di Aceh. Anehnya, belum ada suatu kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam era otonomi ini yang secara tegas menyatakan bagaimana program ini disukseskan dan kapan ia akan berakhir.

Keempat, dengan memperhatikan fakta sejarah yang ada, maka agenda kebangkitan dan kemajuan Aceh harus diletakkan pada pendidikan yang memiliki nilai-nilai tertentu bagi terwujudkan kondisi Aceh yang damai secara berkelanjutan. Begitu sentralnya peranan pendidikan bagi kebangkitan dan kemajuan ini, maka krisis multidimensi separah apapun akan dapat diatasi jika dimulai dengan membenahi bidang pendidikan secara terprogram dan sistematis. Dalam hal ini Mohd. Djawad Dahlan mengatakan ”Kita memiliki orang-orang terdidik lulusan perguruan tinggi yang jauh lebih banyak sepanjang sejarah. Namun, kemanusiaan kita berpenyakit. Jadi,

---

[6] Harian Serambi Indonesia, ”*Banyak Murid SD Tak Bisa Membaca*”, tanggal 22 Juli 2009, 22.

sekarang bukan pengetahuan yang kita butuhkan. Kemanusiaan kita membutuhkan sesuatu yang spiritual". Perguruan tinggi telah banyak mencetak manusia yang tidak utuh, manusia bernalar tinggi tetapi berhati kering, mereka meraksasa dalam teknik, tetapi merayap dalam etika dan moral. Di mana-mana tersebar orang intelek yang pongah dengan IPTEK, mereka bingung dalam menikmati hidup selaku hamba Allah.[7]

Lebih lanjut Mohd. Djawad Dahlan menyebut bahwa hakikat pengembangan SDM harus bertumpu pada pendidikan akhlak dan moral bangsa. Jika pada bidang ini berhasil, kita mudah mengembangkan keunggulan di bidang lainnya. Ini penting, karena fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat mengisyaratkan: "semakin banyak orang pandai, semakin sulit dicari orang jujur". Jadi, agar kita lebih manusiawi, dibutuhkan sesuatu yang sifatnya ruhaniah. Atas dasar tuntutan dan harapan inilah, maka ada dua hal yang patut dipertanyakan di sini, yakni: (1) apa kesalahan dalam sistem pendidikan yang ada sehingga tidak mampu menyiapkan manusia berakhlak tinggi dan unggul di bidang keahliannya; dan (2) sistem pendidikan seperti apakah yang dapat memenuhi harapan itu? Adakah kesalahan dalam sistem pendidikan yang ada sehingga menyebabkan tak selarasnya antara ilmu yang dimiliki oleh para lulusan dengan rendahnya akhlak yang dimilikinya itu. Di sinilah letak urgensinya pendidikan nilai bagi kelangsungan hidup paserta didik di masa depan.

b. Pendidikan Nilai dan Implikasinya

Pada intinya nilai terdiri dari dua kategori, yakni nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri individu kemudian berkembang menjadi perilaku dan menjadi cara individu itu memperlakukan orang lain. Yang termasuk ke dalam nilai-nilai nurani, yakni kejujuran, keberanian, cinta damai, disiplin, kesesuaian dan kepantasan. Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang seyogianya dipraktikkan atau diwujudkan oleh setiap individu untuk

[7] Mohamad Djawad Dahlan, "Warna Arah Bimbingan dan Konseling Alternatif di Era Globalisasi" Bandung: Psikopedagogia: *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, Vol. 2 Nomor 3, Mei 2001, 139-140.

kemudian ia akan menerima sesuai dengan apa yang ia praktikkan. Di antara nilai-nilai yang termasuk kategori ini adalah kesetiaan, kepercayaan, saling menghormati, kasih sayang, baik hati, ramah, berlaku adil, kepedulian dan sebagainya. Terkait dengan persoalan nilai ini, UNESCO menekankan pentingnya martabat manusia (*human dignity*) sebagai nilai tertinggi. Penghargaan terhadap martabat manusia dipandang sebagai nilai yang tidak terbatas dan dapat mendorong manusia untuk memilih nilai-nilai dasar yang terkait dengannya, antara lain adalah; Nilai dasar kebenaran, kesehatan, kasih sayang, spiritual, tanggung jawab sosial, efesiensi ekonomi, nasionalisme dan nilai dasar solidaritas global.

Di samping itu, UNESCO telah merumuskan empat pilar pendidikan yang inovatif dan relevan untuk pengembangan pendidikan nilai, yakni belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*) dan belajar hidup bersama (*learing to live together*). Apabila empat pilar pendidikan ini diartikulasikan dalam pendidikan nilai, maka pendidikan nilai dituntut untuk menyediakan suasana kondusif bagi perkembangan peserta didik.[8] Penyediaan suasana kondusif ini dalam sistem pendidikan formal di Aceh dapat ditempuh melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Peserta didik dibimbing dan dilatih untuk memperluas wawasan pengetahuannya tentang nilai, sehingga mereka dapat memberikan alasan-alasan moral sebelum mereka dituntut untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Dengan demikian, proses belajar untuk mengetahui (*learning to know*) terhadap nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan dapat diterapkan dalam suasana yang penuh pemahaman dan kesadaran.
2. Peserta didik dibimbing dan dilatih untuk memiliki keterampilan melakukan suatu tindakan atau perbuatan dari apa yang diyakininya sebagai nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Tindakan atau perbuatan ini adalah dua hal yang selalu melekat dalam realitas kehidupan seseorang. Oleh karenanya, belajar bertindak dan berbuat itu merupakan belajar mengalami kehidupan yang

[8] Mohamad Djawad Dahlan, "*Warna Arab* .....140-141.

sebenarnya. Jadi, membimbing dan melatih peserta didik untuk mampu berbuat dan bertindak (*learning to do*) itu harus memiliki landasan empirik yang kuat sesuai dengan kultur budaya dan pengalaman hidup yang sesunguhnya serta memiliki signifikansi terhadap prediksi keterampilan perilaku yang dibutuhkan untuk hidup di masa depan.

3. Peserta didik dibimbing dan dilatih untuk memiliki sifat-sifat baik dan melekat pada diri mereka. Nilai-nilai yang diputuskan oleh peserta didik itu untuk selalu diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan nyata, maka keberlangsungan perwujudannya itu haruslah sepanjang hayat. Untuk itu, proses pendidikan nilai memerlukan tingkat konsistensi, intensitas dan frekuensi yang tinggi dalam pembiasaannya mengenai hal-hal yang diputusan sebagai benar, baik, indah dan bermoral. Dengan demikian, belajar untuk menjadi dirinya sendiri (*learning to be*) itu harus benar-benar melalui proses internalisasi yang mendalam dan berkesinambungan. Mohamad Surya menyebut salah satu tugas hidup yang perlu dibimbing dan dilatih dalam bidang ini adalah regulasi diri, yakni peserta didik mampu mengatur diri sendiri, seperti dalam hal: (1) mewujudkan dan mempertahankan harga diri; (2) pengendalian diri; (3) keyakinan dan harapan yang realistik; (4) spontanitas dan respon emosionalnya secara tepat; (5) stimulasi intelektual, pemecahan masalah dan kreativitas; (6) rasa humor; dan (7) kesegaran jasmani serta mampu menumbuh kembangkan kebiasaan hidup sehat.[9]
4. Peserta didik dibimbing dan dilatih untuk hidup secara harmonis dalam lingkungannya. Setiap individu sebenarnya tidak dapat hidup tanpa orang lain dan selalu mempunyai kepentingan terhadap individu lainnya (hidup sebagai anggota masyarakat). Untuk itu, peserta didik sebagai anggota masyarakat dituntut mampu menampilkan perilaku-perilaku yang baik dan benar, sehingga dapat hidup harmonis dalam lingkungan masyarakatnya serta tidak merugikan orang lain. Dalam penerapan pendidikan nilai ini selain menitik beratkan pada kemampuan peserta didik untuk kebebasan memilih, keaslian tindakan dan konsistensi, juga dititikberatkan

[9] Mohamad Surya, *Psikologi Konseling* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), 204.

pada pelibatan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat dan dinas/intansi terkait untuk turut serta memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar hidup bersama (*learning to live together*). Lebih lanjut Mohamad Surya juga menekankan pentingnya peserta didik dibimbing dan dilatih untuk mampu mengemban tugas hidup bidang persahabatan,[10] yakni membangun hubungan sosial antar individu dalam masyarakat dengan suatu komitmen bersama atas dasar keakraban dan saling pengertian. Dalam persahabatan ini, peserta didik akan memperoleh dukungan sosial, dukungan emosional, dukungan informasi dan sebagainya.

c. Program aksi untuk Aceh damai berkelanjutan

Sejalan dengan beberapa implikasi pendidikan nilai bagi pengembangan martabat manusia dan nilai-nilai dasar yang terkait dengannya sebagaimana dikemukakan di atas, maka di sini diajukan beberapa program aksi pendidikan nilai bagi masyarakat Aceh, yang dalam kajian ini ditekankan pada aspek penanaman nilai-nilai religius, nilai kewirausahaan dan praktik pendidikan tanpa kekerasan. Dengan fokus pada tiga aspek ini memang diakui belum menyentuh secara menyeluruh upaya-upaya mewujudkan Aceh damai secara berkelanjutan. Namun demikian, setidak-tidaknya jika tiga aspek ini diterapkan secara baik, sistematis dan berkesinambungan juga memberikan kontribusi siginfikan untuk Aceh damai itu dari sisi peranan pendidikan formal di sekolah.

Pertama, menanamkan nilai-nilai Islami sebagai pandangan hidup peserta didik. Mohamad Djawad Dahlan menyebut bahwa adanya perbedaan pandangan hidup berdampak besar terhadap penerapan pendidikan nilai yang dikembangkan di negara itu.[11] Sejalan dengan pernyataan ini dapat di lihat misalnya, Amerika Serikat menganut sistem liberal yang menganggap tinggi nilai individu. Kebenaran dipandangnya tidak mutlak. Individu berhak menginterpretasi terhadap kebenaran, bahkan nilai sebagai individu mendapat perlindu-

[10] Mohamad Surya, *Psikologi*.....205.

[11] Mohamad Djawad Dahlan, *Beberapa Pendekatan dalam Penyuluhan (Konseling): Psikoanalisa, Berpusat Pada Klien, Terapi Tingkah Laku* (Bandung: Diponegoro, 2005), 19.

ngan hukum. Implikasi pendidikannya adalah individu diberi berbagai alternatif yang dapat dipilihnya. Artinya individu dihadapkan pada berbagai model cara hidup dan cara menyelesaikan masalahnya. Lain halnya di negara komunis yang menganggap adanya kebenaran negara, yang benar ialah komunisme. Nilai sebagai individu tidak begitu tinggi, sehingga pendidikan lebih melihat individu sebagai makhluk biologis. Dalam prinsip pendidikan, tingkah laku individu dibentuk berdasarkan upaya rekayasa dan pengkondisian lingkungan. Berbeda halnya dengan Indonesia yang menganut adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan YME. Kebenaran mutlak tersebut menentukan pola tingkah laku manusia, melalui proses pengembangan potensi yang memiliki kebebasan untuk berkembang. Implikasi pendidikan adalah individu perlu diberi rambu-rambu untuk menuju kepada kemutlakan dan diharapkan dapat menemukan makna dirinya selaku hamba dari Pencipta Kemutlakan, yakni Allah Swt.

Kedua, menanamkan nilai kewirausahaan (*entrepreneurship*) ke dalam diri peserta didik. Idealnya, ketika seseorang lulus menjadi sarjana misalnya, adalah merupakan suatu prestasi yang amat membanggakan. Namun bila dalam waktu yang lama belum mendapat pekerjaan, maka rasa bangga itu akan luntur dan berbalik menjadi rasa malu, stress yang akan berlanjut menjadi frustasi. Situasi ini akan diperparah lagi, karena sebagian besar para lulusan perguruan tinggi di Aceh, meski belum dilakukan survey yang mendalam, adalah berjiwa ”pencari kerja”. Jiwa ”pencari kerja” ini sebagian besar disebabkan oleh sistem pembelajaran di Aceh pada umumnya bersifat mendorong peserta didiknya untuk cepat lulus dan segera ”mencari kerja”. Para lulusan kurang mendapat pembinaan untuk menjadi lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan membuka lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu, ada satu hal yang perlu diluruskan dalam tradisi penyelenggaraan pendidikan di Aceh, yakni lembaga pendidikan merupakan lembaga paling efektif untuk proses menanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Untuk kasus perguruan tinggi, di tengah suasana semakin sulitnya mencari pekerjaan bagi para lulusannya, telah

muncul beberapa perguruan tinggi di kota-kota besar yang berusaha membuka progran studi baru yang berbasis pada ekonomi dan bisnis dengan *soft skill* wirausaha. *Soft skill* merupakan keterampilan yang bersifat *invisible* dan tidak langsung atau segera, misalnya kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan *conflict resolution*. Sebagian dari program studi yang baru dibuka itu, menawarkan materi-materi kuliah dengan muatan ekonomi dan bisnis yang lebih variatif untuk memenangkan persaingan global yang semakin ketat.[12]

Di samping itu, juga ditemukan sejumlah perguruan tinggi baru dengan amat berani menawarkan bahwa nilai-nilai kewirausahaan menjadi jiwa dari perguruan tinggi tersebut. Artinya tidak hanya dalam muatan materi kuliahnya saja sebagai *soft skill*, namun juga metode pembelajarannya pun mengutamakan nilai-nilai kewirausahaan. Mengapa demikian? Karena suatu masyarakat tidak akan maju jika hanya mampu menghasilkan sarjana ”pencari kerja”. Sebaliknya, akan menjadi masyarakat yang makmur, jika mampu menghasilkan para lulusan yang tidak hanya sebagai intelektual tetapi juga mampu ”menciptakan” lapangan pekerjaan. Dengan demikian, program aksi yang penting difokuskan di sini adalah nilai-nilai kewirausahaan harus menjadi arah pengembangan paradigma baru pendidikan di Aceh. Dengan terbukanya berbagai lapangan kerja, para pemuda lebih berpeluang untuk mengembangkan karirnya. Ini sekaligus menjadi faktor yang mendukung peningkatan pendapatan, membuat hidup masyarakat menjadi sejahtera, aman dan damai.

Ketiga, program aksi berikutnya adalah menerapkan praktik pendidikan sekolah tanpa kekerasan. Dengan praktik tak ada kekerasan di sekolah, baik guru maupun peserta didik harus berusaha menghindari diri dari kebiasaan buruk berlaku kasar ketika proses belajar mengajar berlangsung maupun dalam pergaulannya di lingkungan sekolah. Dengan motto tak ada kekerasan ini merupakan disiplin serius yang harus ditegakkan oleh setiap sekolah di Aceh. Hal ini penting, mengingat pengalaman konflik masa lalu yang amat

[12] Media Indonesia, ”*Jika Jiwa Wirausaha Jauh Panggang dari Api*”, tanggal 30 April 2009, 23.

melelahkan dan pengalaman psikologis peserta didik akibat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Dari pengalaman yang tak ada kekerasan inilah diharapkan manajemen sekolah menebarkan kredo/motto *non-violence* kepada senegap warga masyarakat luas, baik melalui rapat-rapat komite sekolah maupun dari mulut ke mulut terutama melalui penuturan peserta didik berbasis pengalaman mereka belajar di sekolah dalam suasana yang menyenangkan.

Mengapa masalah praktik pendidikan sekolah tanpa kekerasan ini dipandang penting untuk ditumbuhkembangkan, karena di berbagai media massa sering dilaporkan bahwa tindak kekerasan dari pihak sekolah terhadap peserta didiknya masih kerap terjadi. Sebagai contoh kasus, dugaan tindak kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru pada SMAN I Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Seperti diberitakan oleh Surat Kabar Harian Serambi Indonesia, bahwa Mutia Phonna (15 tahun) ditampar dan ditarik pada jilbabnya oleh guru hingga ia tersungkur ke lantai. Akibatnya, Mutia Phonna harus dirawat di RS Kesrem Lhohseumawe karena mengalami infeksi telingan.[13]

Dalam konteks kasus seperti di atas, maka seyogianya guru mampu menampilkan diri sebagai sosok pendidik teladan, dipercaya dan ditiru tingkah lakunya oleh peserta didik.[14] Oleh karena itu, guru adalah *digugu* dan *ditiru*. Ungkapan semacam ini merupakan gambaran idealisme guru. Idealnya untuk Aceh damai berkelanjutan, ungkapan ini perlu dicanangkan menjadi suatu model praktik pendidikan sekolah tanpa kekerasan, yakni guru sebagai pendidik profesional harus selalu memikirkan dan merenungkan perilaku diri sendiri dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian, karena apa saja yang dilakukan guru akan dijadikan teladan tidak hanya oleh peserta didiknya, tetapi oleh masyarakat di sekitarnya. Model praktik pendidikan tanpa kekerasan adalah model yang sangat umum dan dapat diamati dalam kehidupan pendidikan sekolah sehari-hari. Di

---

[13] Harian Serambi Indonesia, "*Pendidikan Harus Bebas dari Tindak Kekerasan*", tanggal 28 Juli 2009, 1.

[14] Wakhid Akhdinirwanto dan Ida Ayu Sayogyani, *Cara Mudah Mengembangkan Profesi Guru* (Yogyakarta: Pengurus Wilayah Agupena DIY dan Sabda Media, 2009).

samping itu, perlu juga dikembangkan model pendidikan yang sifatnya tersirat dalam berbagai pepatah budaya yang secara umum mudah dipahami oleh setiap orang. Di antaranya, pepatah "*jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari*".

Dalam proses sosio-kultural, maka pendidikan nilai religius, kewirausahaan dan praktik pendidikan tanpa kekerasan ini selanjutnya diintegrasikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan kultural tertentu, yakni adat budaya masyarakat Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan kesepakatan antara pihak sekolah dan masyarakat setempat, yang dalam praktik sekarang ini disebut Komite Sekolah, untuk merumuskan dan mendukung penerapan nilai-nilai yang harus diajarkan kepada peserta didik dan peranan-peranan yang harus dimainkan oleh pihak sekolah dan oleh masyarakatnya.

C. Penutup

Manusia adalah makhluk sosial, tidak ada orang yang dapat hidup tanpa orang lain. Bayi yang baru lahir perlu kepada pertolongan ibunya untuk menyusui, makan, tidur, istirahat dan lain-lain. Setelah bayi agak besar, ia perlu kepada kawan-kawan untuk bermain. Di sekolah ia perlu kepada bantuan guru untuk mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan. Ketika remaja, ia perlu kepada teman sebaya untuk bertukar pikiran dan menyampaikan isi hati serta perasaan. Setelah dewasa ia perlu berkeluarga dan membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dalam dunia kerja ia perlu kerjasama dengan teman-temannya untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan. Ketika usia lanjut ia perlu bantuan orang lain, terutama sanak keluarga untuk menikmati hari-hari tuanya. Bahkan ketika meninggal dunia pun ia perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tajhiz janazah, penyelesaian harta warisan, utang piutang dan sebagainya.

Dalam berbagai interaksi itu, adanya konflik antar manusia adalah merupakan masalah yang amat penting untuk dihindari. Dalam hubungan antar manusia, konflik bermakna perlawanan atau bentrokan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena adanya faktor-faktor pemicunya. Beberapa faktor itu, antara lain adanya

perilaku seseorang yang mengganggu orang lain, persaingan tidak sehat dalam memenuhi kebutuhan atau mereka tidak memiliki kesamaan persepsi mengenai nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan dan keindahan, tidak terkecuali dengan konflik yang terjadi di Aceh beberapa waktu yang lalu.

Penerapan pendidikan nilai dalam sistem pendidikan sekolah di Aceh haruslah menyentuh aspek filosofi tujuan pendidikan, yakni memanusia-kan manusia, membangunan manusia paripurna dan membentuk insan kamil atau manusia seutuhnya. Salah satu indikatornya adalah menjadi individu yang secara gigih memperjuang-kan hak-haknya, dan secara arif menghormati hak-hak orang lain. Kegagalan pendidikan yang paling fatal adalah ketika produk didik (para lulusan) tidak lagi memiliki kepekaan nurani yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas, moralitas dan *sence of humanity*. Ketika para lulusan pendidikan tidak lagi peduli, bahkan secara tragis berusaha menafikan eksistensi kemanusiaan orang lain, seperti intimidasi, penculikan, penghilangan dan pembunuhan, maka produk pendidikan yang dihasilkan itu telah berada pada tingkat yang sangat rendah dan menakutkan.

Oleh karena itu, dengan penerapan nilai-nilai Islami, diharapkan masa depan kehidupan peserta didik menjadi terarah dan tidak salah kaprah. Dengan penerapan nilai keriwausahaan, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkiprah dalam kancah persaingan global, mampu bekerja dengan penghasilan yang layak dan memenuhi kebutuhan kehidupan, bahkan siap menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian pula dengan penerapan praktik pendidikan tanpa kekerasaan, diharapkan peserta didik dapat menghayati indahnya kehidupan, cinta damai, hidup harmonis, dan suka menebarkan kasih sayang. Mereka menjadi tidak suka kepada permusuhan, pertikaian, pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan lainnya, Insya Allah.

Daftar Pustaka

Akhdinirwanto, Wakhid dan Ida Ayu Sayogyani. *Cara Mudah Mengembangkan Profesi Guru*. Yogyakarta: Pengurus Wilayah Agupena DIY dan Sabda Media, 2009.

Bertens, K. *Etika*. Seri Filsafat Atma Jaya 15. Jakarta: Gramedia, 1999.

Chapplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Alih Bahasa: Kartini Kartono. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Dahlan, Mohamad Djawad. *Beberapa Pendekatan dalam Penyuluhan (Konseling): Psikoanalisa, Berpusat Pada Klien, Terapi Tingkah Laku*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Dahlan, Mohamad Djawad. "Warna Arah Bimbingan dan Konseling Alternatif Di Era Globalisasi". Bandung: Psikopedagogia: *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*. Vol. 2 Nomor 3, Mei 2001, 139-140.

Elmubarok, Zaim. *Membumikan Pendidikan Nilai*: *Mengumpul yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan Menyatu yang Tercerai*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Harian Serambi Indonesia. "*Banyak Murid SD Tak Bisa Membaca*". Tanggal 22 Juli 2009, 22.

Harian Serambi Indonesia. "*Pendidikan Harus Bebas dari Tindak Kekerasan"*. Tanggal 28 Juli 2009, 1.

Media Indonesia. "*Jika Jiwa Wirausaha Jauh Panggang dari Api*". Tanggal 30 April 2009, 23.

Mulyana, Rohmat. *Mengaktualisasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeda, 2004.

Surya, Mohamad. *Psikologi Konseling*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003.